

PENGARUH PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT), PERSEPSI STATUS WILAYAH, DAN STANDAR HIDUP TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BASEH, KECAMATAN KEDUNGBANTENG, KABUPATEN BANYUMAS

Ririn Widyawati^{1*}, Eko Suyono², Uswatun Hasanah³, Wawan Setiawan⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ririn.widyawati@mhs.unsoed.ac.id, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, eko.suyono@unsoed.ac.id, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, uswatun.khasanah@unsoed.ac.id, Indonesia

⁴Kanwil DJPb, Indonesia

*Corresponding author

ABSTRAK

Tingginya angka pengangguran salah satunya menjadi penyebab kemiskinan yang kerap menjadi masalah setiap tahunnya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Baseh dengan jumlah penduduk per tahun 2022 yaitu 4.456 jiwa. Dimana permasalahan hingga saat ini yang menjadi upaya bersama yaitu mengenai kesejahteraan masyarakat. Data per tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 1.070 jiwa dimana 546 penduduk laki-laki diantaranya tidak bekerja dan penduduk perempuan sebanyak 1.179 jiwa hanya mengurus rumah tangga. Hal tersebut menjadi salah satu dari banyak faktor yang menjadi penyebab kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang tentunya berdampak pada ekonomi masyarakat. Serta diperkuat dengan data tahun 2021, Baseh menjadi salah satu dari 5 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Kecamatan Kedungbanteng. Penelitian ini menggunakan teori *New Public Management* yang dikaitkan dengan implementasi birokrasi yang ada di pemerintahan desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyaluran BLT, persepsi status wilayah, dan standar hidup terhadap kesejahteraan masyarakat. Populasinya adalah masyarakat Desa Baseh dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 104. Teknik yang digunakan yaitu *simple random sampling*. Dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyaluran BLT berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, (2) Persepsi status wilayah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan (3) Standar hidup berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian bahwa dalam penyaluran BLT pihak desa harus dapat lebih selektif. Kemudian dalam laporan realisasi anggaran dana desa, Baseh sudah sesuai dengan SAP Desa dan untuk pengalokasian setiap program terutama untuk BLT DD minimal 40% dari dana desa harus lebih sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.

Kata Kunci: BLT, Dana Desa, SAP Desa, *New Public Management*, Kesejahteraan Masyarakat.

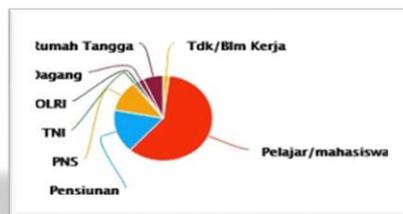
1. Pendahuluan

Desa mempunyai karakteristik sumber daya alam yang indah, suasana yang tenang dan penduduk yang damai. Namun di desa terdapat permasalahan yang krusial yaitu mengenai kemiskinan. Tak terkecuali permasalahan yang terjadi di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Data pada 2022 menunjukkan bahwa dari total penduduk yang masuk angkatan kerja sebanyak 1.070 jiwa, dimana 546 penduduk laki-laki diantaranya tidak bekerja.

Begitupun dengan penduduk perempuan yang masuk angkatan kerja sebanyak 1.179 jiwa hanya mengurus rumah tangga. Karena salah satu ciri kesejahteraan masyarakat adalah terciptanya kesetaraan gender. Potensi tercapainya kesejahteraan masyarakat dapat terbentuk salah satunya melalui pengoptimalan potensi sumber daya alam yang ada di desa. Dari pengoptimalan sumber daya alam juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga perlahan kesejahteraan masyarakat pun dapat tercapai.

Potret kesejahteraan masyarakat yang belum tinggi di Baseh, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak dua tahun terakhir menimbulkan dampak yang begitu berarti bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi yaitu memberikan dukungan berupa transfer dana ke daerah. Ada empat program dari penyaluran dana desa: 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan minimal pengalokasiannya sebanyak 40%; 2) Ketahanan pangan sebesar 20%; 3) Penanganan COVID-19 sebesar 8%; 4) Selebihnya digunakan untuk sektor penting lainnya. Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program dengan alokasi dana desa tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebanyak Rp 68 triliun. Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan program pemerintah bagi warga negaranya yang terdampak pandemi COVID-19, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), keluarga miskin, dan terkena penyakit menahun, namun belum menerima bantuan yang lainnya. Seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH) dan kartu pra kerja. Jadi dalam satu keluarga hanya berhak mendapat satu program bantuan dari pemerintah. BLT disalurkan bertahap setiap bulannya. Besaran nominal untuk setiap kali penerimaan yaitu sebesar Rp300 ribu. Pada masa pandemi seperti sekarang ini bantuan terus digelontorkan, terlebih ke desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menjelaskan bahwa pengertian desa yaitu desa atau desa adat atau yang sering disebut desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baseh merupakan salah satu desa dengan potensi wisata yang bagus dan sumber daya alam yang melimpah. Sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedungbanteng, Baseh mempunyai luas wilayah 395 hektar dengan jumlah penduduk 4.466 jiwa. Dengan rata-rata penduduknya masih menempuh pendidikan.



Gambar 1. Diagram Pekerjaan Penduduk Desa Baseh Tahun 2022

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa pada diagram untuk penduduk yang bekerja seperti dagang, POLRI, TNI dan PNS proporsinya lebih sedikit sehingga dengan adanya pandemi

tentunya memberikan dampak, khususnya penduduk non POLRI, TNI dan PNS. Hal tersebut juga diperkuat bahwa pada tahun 2021 Baseh tergolong sebagai desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Kecamatan Kedungbanteng. Hal ini disebabkan oleh banyaknya data yang masuk untuk mendaftar program bantuan pangan non tunai (BPNT). Para warga masyarakat berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri dengan harapan dapat memperoleh BPNT tersebut. Kemudian laporan realisasi anggaran tahun 2021 menunjukkan penduduk Desa Baseh yang mendapatkan BLT sebanyak 45 jiwa. Dengan demikian mengalami penurunan dari tahun 2020, yang semula sekitar 100 jiwa menurun menjadi 45 jiwa. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sehingga jumlah penduduk yang menerima BLT sebanyak 140.

Laporan realisasi tersebut juga sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Desa dimana laporan realisasi anggaran ini mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/ APBN. Dalam SAP Desa pernyataan No. 1 tentang Laporan Realisasi anggaran menjelaskan bahwa yang disajikan dalam LRA antara lain ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dan berdasarkan SAP Desa pernyataan No.1 ayat 37 menyebutkan bahwa dalam LRA harus menyajikan sekurang-kurangnya seperti pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran. Terkait dengan penerimaan Dana Desa dari pemerintah ke Desa Baseh dari tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Untuk tahun 2022 Baseh mendapatkan Dana Desa sebesar Rp1,92 milyar. Dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 desa wajib mengalokasikan dana yaitu 40% dari total dana desa yang diterima. Dengan demikian sebesar dana kurang lebih Rp 768 seharusnya dianggarkan untuk penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).

2. Tinjauan Pustaka

New Public Management atau manajemen publik baru merupakan sebuah pendekatan dalam menjalankan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik/ pemerintahan yang menitikberatkan pada anggapan: “bahwa manajemen yang diterapkan oleh sektor bisnis lebih unggul dari pada manajemen yang diselenggarakan oleh birokrasi”, sehingga karenanya manajemen pelayanan publik perlu diubah seperti manajemen di sektor bisnis. NPM ini beranggapan bahwa sistem manajemen dalam organisasi publik dapat diperbaiki dengan mengadopsi praktik dan taktik manajemen yang diterapkan di sektor bisnis/ swasta seperti mekanisme pasar, kompetisi tender, hingga privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh organisasi/negara. Menurut Hood, aspek-aspek penting yang menjadi perhatian dalam paradigma NPM antara lain:



Gambar 2. Aspek-Aspek Penting dalam Paradigma NPM

Orientasi dari NPM yaitu bisnis dan bebas. Bisnis artinya hubungan antara negara dan birokrasi merupakan hubungan bisnis (efektif dan efisien). Kemudian orientasi bebas artinya kreatif dan terbuka. Praktik NPM pada Desa ini harapannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja. Hal tersebut juga berkaitan dengan konsep NPM dimana salah satu prinsip utama dari NPM adalah pengukuran kinerja. Tujuan dari penerapan NPM untuk dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi, memperbaiki akuntabilitas manajerial serta meningkatkan responsivitas.

2.1 Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dana desa merupakan suatu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana desa tersebut ditujukan untuk desa-desa yang penyalurannya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/ kota. Dimana pemanfaatan dana tersebut untuk membiayai administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.

2.2 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Kriteria penerima manfaat BLT antara lain: 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, 2) Kehilangan mata pencaharian, 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, 4) Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan daerah (APBD) dan/atau dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), 5) Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan, dan 6) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

2.3 Bantuan Langsung Tunai

Setiap desa wajib untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, salah satunya penyaluran BLT. Untuk penyaluran BLT tahun 2022 desa harus melaksanakan kebijakan

sebagai berikut: 1) BLT Desa bersifat wajib, 2) KPM yang diinput berdasarkan perkades atau keputusan kepala desa, 3) Jumlah KPM yang diinput harus sama dengan Perkades atau Keputusan Kepala Desa, 4) Penyaluran dana desa tidak mensyaratkan peraturan kepala daerah (perkades) mengenai rincian dana desa per desa, 5) Persyaratan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang semula syarat penyaluran dana desa tahap III menjadi syarat penyaluran tahap I, 6) Telah diatur kembali ketentuan paling lambat penyampaian syarat penyaluran dana desa.

2.4 Persepsi Status Wilayah

Menurut Walgito (2010: 53) mendefinisikan bahwa persepsi adalah suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Persepsi juga dapat diartikan proses pengidentifikasian sesuatu menggunakan panca indra. Persepsi status wilayah merupakan pandangan seseorang mengenai status wilayah yang dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Status wilayah terbagi menjadi dua yaitu perkotaan dan perdesaan. Kaitannya persepsi status wilayah dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang ada di Baseh melihat dari karakteristik masyarakat desa yaitu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sebagian besar diperoleh melalui pertanian/ hasil kebun. Mereka lebih menekankan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan pertanian. Dengan demikian, apabila masyarakat tidak menerima BLT masih dapat memenuhi kebutuhan pokok melalui hasil pertanian/ perkebunan. Sejalan dengan karakteristik yang menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat desa mempunyai hubungan antar sesama yang dekat, kaitannya dengan BLT ini masyarakat yang tidak menerima dapat dibantu oleh masyarakat lain. Karena di perdesaan umumnya masih kental budaya gotong royong.

2.5 Standar Hidup

Kemampuan ekonomi seseorang untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya adalah pengertian dari standar hidup. Jika semakin besar hasil produksi baik barang maupun jasa yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula standar hidup suatu wilayah.

2.6 Penelitian Terdahulu

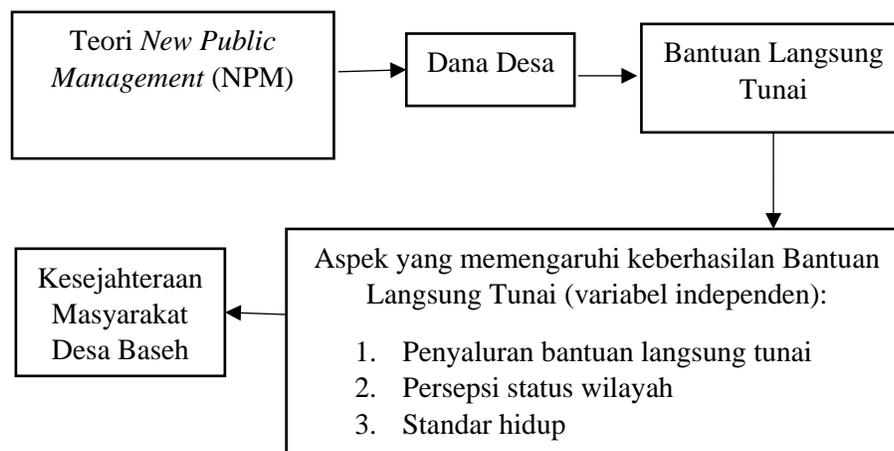
Penelitian yang berjudul Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu mendeskripsikan evaluasi kebijakan BLT. Hasil dari perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($4,1 \geq 1,296$). Jadi, evaluasi program BLT di Kecamatan Kramatwatu mencapai angka yang lebih besar dari yang dihipotesiskan yaitu sebesar 66,6% dengan angka dihipotesisnya yaitu 65% (Dewi, 2011). Selanjutnya penelitian Rahmatulloh (2020), yang berjudul Dampak BLT Terhadap Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Dusun Kertasari Desa Sukarema Kecamatan Lenek Tahun 2020. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) tidak memiliki dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BLT tidak memiliki dampak secara langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat namun hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kemudian menurut Pramanik (2020), yang berjudul Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang pada Masa Pandemi COVID-19. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bantuan paket

sembako dan bantuan langsung tunai berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup masyarakat dengan besaran pengaruhnya sebesar 10,2% terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

2.7 Kerangka Pemikiran

New Public Management (NPM) merupakan sebuah sistem manajemen yang terdesentralisasi dengan perangkat manajemen seperti pengawasan dan perbandingan yang menerapkan kerja sektor privat ke sektor publik untuk membuat efektifitas dan kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Dimana dari *good governance* itulah yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAP Desa).

Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban desa mengenai laporan keuangannya salah satunya dalam hal pengeluaran untuk bantuan langsung tunai (BLT). Dimana pengeluaran BLT yang diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2021 bahwa minimal sebesar 40% digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan dan memperjelas arah penelitian, serta memahami pengaruh program bantuan langsung tunai (BLT) seperti menurut Iping (2020), BLT memberikan dampak yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan daya beli kepada kelompok pelaku usaha guna kesimbangan usaha dan dapat meminimalisir dampak PHK. Kemudian untuk mengetahui pengaruh persepsi status wilayah dan status hidup terhadap kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

2.8 Pengembangan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan oleh pamungkas et al. (2020), yang menggunakan dana desa pada waktu COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk BLT Desa dapat tersalurkan ke 24.772 Kepala

Keluarga penerima bantuan. Menurut Iping (2020), BLT memberikan dampak yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan daya beli kepada kelompok pelaku usaha guna kesimbangan usaha dan dapat meminimalisir dampak PHK. Penyaluran BLT dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila pemerintah ini menyalurkan BLT tersebut pada kelompok masyarakat yang mempunyai sumber ekonomi dan memiliki kreativitas usaha. Berdasarkan hasil uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah: Penyaluran bantuan langsung tunai berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Status wilayah Baseh ini merupakan perdesaan. Dimana masih banyaknya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Berbeda halnya dengan wilayah perkotaan dimana sumber daya alam relatif sedikit sehingga cenderung masyarakatnya memiliki budaya konsumtif. Bantuan langsung tunai (BLT) tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat baik di wilayah perdesaan maupun di perkotaan. Namun, untuk ketika masyarakat perdesaan tidak mendapat bantuan tersebut dari segi ketahanan pangan lebih baik dibanding masyarakat perkotaan. Persepsi juga kaitannya dengan cara pandangan masyarakat terhadap keadaan yang terdapat di desanya. Seperti dari segi tingkat kemiskinan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Terkait dengan tingkat kemiskinan ini, tentunya setiap orang mempunyai cara pandang yang berbeda. Ada yang melihat dari data atau informasi yang diberikan oleh pihak terkait, ada yang bercermin dari budaya konsumsi masyarakat dan ada yang berpendapat dari perspektif tingginya angka penduduk yang bekerja serta dari aspek yang lainnya. Kemudian dari segi sumber daya alam yang ada di desa. Sebenarnya banyak atau sedikitnya potensi sumber daya alam yang ada di desa itu bukan merupakan suatu kendala yang besar. Tetapi dengan adanya sumber daya alam yang sedikit jika dapat dimanfaatkan secara optimal akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan pendapatan asli desa (PAD). Desa yang kaya itu bukan tercermin dari banyaknya sumber daya yang ada, tetapi bagaimana sumber daya manusianya yang dapat mengoptimalkan seluruh elemen yang berpotensi untuk dapat membantu memberikan kemajuan bagi desa dan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kekurangan/kendala yang ada di desa jika sumber daya manusianya mempunyai kualitas yang bagus, dapat berinovasi dan memiliki kreativitas maka akan dapat menjadikan kendala tersebut menjadi sebuah potensi sekaligus dapat mengatasi kendala yang ada. Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia terlebih di pedesaan merupakan upaya yang sebaiknya terus dilakukan agar dapat membantu membangun desa yang maju dan kesejahteraan masyarakat pun dapat selalu meningkat. Jadi, persepsi status wilayah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Standar hidup ini berkaitan dengan teori kualitas. Makalah berjudul “Teori Kualitas dan Standar Hidup Manusia” menjelaskan bahwa standar hidup (*standar of living*) mengacu pada kemampuan untuk membeli sejumlah barang dan jasa dengan uang yang dimilikinya. Dalam hal ini standar hidup bermakna cukup untuk membiayai keperluan hidup. Misalnya makanan, pakaian, rumah, pendidikan, rekreasi serta perlindungan asuransi. Hal ini berlawanan dengan kualitas hidup dimana tidak hanya standar hidup yang bersifat material saja namun juga terdapat faktor lain. Faktor tersebut yaitu faktor subyektif lainnya seperti keamanan, kesehatan mental, budaya, kehidupan sosial, hiburan dan lain sebagainya. Individu dalam upaya melakukan pemenuhan kebutuhan dan keinginan tentunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dari syarat-syarat itulah yang dinamakan standar hidup manusia. Antara individu satu dengan yang lainnya kemungkinan besar banyak perbedaan. Namun dalam penerapannya, standar hidup adalah rata-rata produk domestik produk bruto riil per orang (PDB riil per kapita). Menurut Yuliani (2019), standar hidup itu dapat

diartikan juga sebagai suatu hal yang cukup dalam membiayai keperluan hidup. Seperti halnya makanan, minuman, perumahan, rekreasi, pendidikan dan perlindungan asuransi. Dalam memenuhi semua kebutuhan dan keinginan, setiap individu perlu mendapatkan pemasukan. Dimana perolehannya dapat melalui hasil pendapatan dari pekerjaan yang dapat memperoleh gaji, upah maupun kompensasi. Oleh karena itu individu membutuhkan yang namanya pekerjaan untuk dapat memperoleh pemasukan dan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah standar hidup berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan populasi yaitu masyarakat Desa Baseh. Teknik yang digunakan ialah *simple random sampling* dimana merupakan suatu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2001). Jumlah sampel sebanyak 140 responden yang dihitung dengan menggunakan rumus slofin. Pengumpulan data melalui kuesioner dengan pertanyaan/ pernyataan yang diajukan merupakan pertanyaan tertutup (*closed added*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana variabel independen terdiri dari penyaluran BLT (X1), persepsi status wilayah (X2), standar hidup (X3) dengan variabel dependennya yaitu kesejahteraan masyarakat (Y). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk uji keabsahan datanya menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas serta uji hipotesis. Selanjutnya uji lainnya juga dilakukan seperti analisis regresi berganda, analisis koefisien determinasi, uji f dan uji t.

4. Hasil

Dalam kaitannya menjawab hipotesis yang telah diajukan maka untuk menjawab dugaan sementara perlu dilakukan suatu pengujian dan analisis. Berikut ini hasil uji dan analisis yang telah dilakukan.

4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu data dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan. Untuk itu dilakukan analisis item dengan metode korelasi *product moment pearson* (r). Dari hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan variabel penelitian mempunyai signifikansi pearson correlation $< 0,05$, yang artinya seluruh butir pernyataan dan pertanyaan pada variabel penelitian dinyatakan valid sehingga seluruh butir pernyataan dan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dapat dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

4.2 Uji Reliabilitas

Dari hasil uji reliabilitas diperoleh seluruh variabel penelitian ini dapat dinyatakan sangat reliabel karena koefisien alpha lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa butir-butir pernyataan dan pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

4.3 Uji Normalitas

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.4 Uji Multikolinearitas

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada bagian collinierity statistic, nilai VIF pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance di atas 0.1. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas.

4.5 Uji Heterokedastisitas

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, nilai signifikansi untuk variabel X1 (penyaluran BLT) sebesar 0,349, variabel X2 (persepsi status wilayah) sebesar 0,336 dan variabel X3 (standar hidup) sebesar 0,265, oleh karena nilai signifikansi (Sig) antara variabel independen dengan absolut residul lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.6 Analisis Koefisien Determinasi

Hasil analisis koefisien determinasi di atas, adalah sebesar 0,567. Hasil ini dapat diartikan bahwa besarnya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 56,7%. Sedangkan sisanya 43,3% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.

4.7 Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila tingkat signifikansi $\leq 0,05$ maka dapat dikatakan secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka signifikan secara bersama-sama antara variabel independen tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji F, dihasilkan dengan nilai Sig F (0,000) $< 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.

4.8 Uji T

Pengujian terhadap hipotesis pertama dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel penyaluran BLT. Besarnya koefisien regresi yaitu 7,748 dan nilai signifikansi 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 7,748 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,987 berarti penyaluran BLT berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, penyaluran BLT berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga hipotesis pertama penelitian ini dapat didukung. Kemudian untuk hipotesis kedua dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel persepsi status wilayah. Besarnya koefisien regresi yaitu 0,836 dan nilai signifikansi 0,405. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi

tersebut tidak signifikan karena signifikansi $0,405 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $0,836$ lebih kecil dari nilai t tabel yaitu $1,987$ yang berarti persepsi status wilayah tidak ada pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, persepsi status wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga hipotesis kedua penelitian ini tidak dapat didukung. Selanjutnya untuk hipotesis ketiga dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pertimbangan pasar kerja. Besarnya koefisien regresi yaitu $3,774$ dan nilai signifikansi $0,000$. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar $3,774$ lebih besar dari nilai t tabel yaitu $1,987$ yang berarti standar hidup berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, standar hidup berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga hipotesis ketiga penelitian ini dapat didukung.

5. Pembahasan

5.1 Pengaruh Penyaluran BLT Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyaluran BLT Dana Desa yang disalurkan melalui pihak desa dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok dan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, mayoritas keluarga bergantung pada penerimaan BLT yang mereka peroleh, terutama untuk keluarga yang kepala rumah tangganya mempunyai pekerjaan yang tidak tetap bahkan pada saat peneliti survey masih terdapat yang biasanya menjadi tulang punggung dalam keluarga tersebut yang menganggur. Kemudian masyarakat yang menerima banyak yang sudah usia lanjut sehingga pendapatannya hanya dari BLT dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dibantu oleh sanak saudaranya.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah penyaluran BLT yang diselenggarakan oleh pihak Desa dapat diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tidak hanya dilihat dari segi bangunan rumah saja tetapi dilihat juga dari segi pemenuhan kebutuhan setiap harinya. Dalam penyaluran BLT juga dapat lebih tepat sasaran dilakukan dengan upaya musyawarah penentuan warga yang berhak menerima dan dilakukan *update* data secara berkala sehingga dapat meminimalisir kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat akibat ketidaktepatan dalam pemberian BLT.

Hasil penelitian ini sesuai penelitian Pramanik (2020) bahwa bantuan langsung tunai berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup masyarakat dengan besaran pengaruhnya sebesar $10,2\%$ terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatulloh (2020), bahwa bantuan langsung tunai tidak memiliki dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian terkait dengan SAP Desa No.1 ayat 37 yang menyebutkan bahwa dalam LRA harus menyajikan sekurang-kurangnya seperti pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran dan untuk Desa Baseh sendiri sudah sesuai dengan SAP Desa tersebut seperti yang tertulis dalam laporan realisasi anggaran tahun 2021. Namun mengenai alokasi dana desa yang dianggarkan untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa desa wajib mengalokasikan dana yaitu 40% dari total dana desa yang diterima. Hal ini terlihat dari laporan realisasi anggaran tahun 2021 dimana untuk total dana desa yang terima sebesar Rp 1.231.601.000 dan 40% nya yaitu sebesar Rp 492.640.400 yang seharusnya dialokasikan untuk BLT DD. Namun, dalam praktiknya dana desa yang disalurkan untuk BLT hanya sebesar Rp 202.500.000. Artinya selisih dana yang seharusnya disalurkan untuk

BLT yaitu sejumlah Rp 290.140.400 atau yang dialokasikan untuk BLT DD hanya sebanyak 16,43%. Hal tersebut dapat dibenahi kembali oleh pihak desa dimana sejalan dengan prinsip dari teori NPM bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya digerakkan oleh misi. Hal ini berkaitan dengan ketercapaiannya tujuan dana desa dimana salah satu diantaranya yaitu mengentaskan kemiskinan. Dan empat diantaranya tentang peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

5.2 Pengaruh Persepsi Status Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan temuan penelitian diatas, maka hal yang dilakukan oleh pihak desa terkait dengan status wilayah Desa Baseh yang merupakan pedesaan dengan penduduk yang rata-rata bekerja diluar kota dan masih terdapat dalam satu keluarga yang tidak bekerja (menganggur) maka lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelatihan dan pemberian lapangan pekerjaan dari *rest area* di Desa Baseh yang masih dalam proses pembangunan mungkin dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan apabila setelah selesai proses pembangunan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk UMKM sehingga dapat berjualan di *rest area* tersebut. Dan alangkah lebih baiknya dapat produk yang dihasilkan merupakan ciri khas/ keunikan dari Desa Baseh. Dengan demikian dapat mempekerjakan masyarakat desa setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada intinya hal yang harus ditingkatkan oleh pihak desa yaitu terkait dengan pengoptimalan potensi desa. Baik itu mengenai sumber daya alam yang melimpah maupun pemandangan alam yang elok. Sejalan dengan teori NPM yang salah satunya aspek pentingnya mengenai standar dan ukuran kinerja. Sehingga harapannya dana desa yang diberikan oleh pemerintah akan meningkat. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) mengatakan bahwa alokasi anggaran seperti yang disebutkan pada ayat (1) huruf b bahwa sumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa ditentukan besarnya melalui empat hal: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Selanjutnya terdapat juga salah satu yang merupakan aspek penting dalam paradigma NPM yaitu menciptakan persaingan untuk dapat berkompetisi menjadi yang terbaik di sektor publik. Jika hal tersebut dapat diterapkan dengan baik di setiap desa. Terutama dalam upaya pengoptimalan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

5.3 Pengaruh Standar Hidup Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian ini membuktikan standar hidup berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi standar hidup akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar hidup adalah kemampuan ekonomi seseorang untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin besar hasil produksi baik barang maupun jasa yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula standar hidup suatu wilayah. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah standar hidup. Standar hidup yang dimiliki oleh masyarakat Desa Baseh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana konsumsi dari masyarakat sendiri sudah cukup baik. Masyarakat yang mempunyai lahan dapat mengambil manfaat dari tanaman yang mereka tanam, sedangkan dari masyarakat lain yang tidak mempunyai lahan untuk menanam mereka dapat membeli terutama untuk bahan pangan yang salah satu sumbernya yaitu dari hasil kebun.

6. Kesimpulan

Hasil penelitian ini membuktikan penyaluran BLT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penyaluran BLT akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini membuktikan persepsi status wilayah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penyaluran BLT akan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini membuktikan standar hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi standar hidup akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menyelenggarakan program Peneliti Muda Berkontribusi dan kepada pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah memfasilitasi pelaksanaan program Peneliti Muda Berkontribusi.

References

- Bawono, Icuk Rangga, Setyadi Erwin (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, A. R. (2021). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai Upaya Penanganan COVID-19 di Desa Tapple Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Hood, C. (1995). The "New Public Management" in the 1980s: Variations on a Theme. *Accounting, Organizationz and Society*, 20 (2/3), 93-109.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terkait Dana Desa Tahun 2022*.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*.
- Lalu, R. (2020). Retrieved Maret 29, 2022, from Lokadata: <http://lokadata.id/artikel/potensi-masalah-dari-blt-dana-desa>
- Laoli, V. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai dalam Pegawai Organisasi Sektor Publik. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 2(2), 231-239. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v2i2.82>
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 4-8.
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi COVID 19. *Jurnal Ekonomi, Sosial 7 Humaniora*, 113-120.
- Rahmatulloh, S. (2020). *Dampak BLT Terhadap Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Dusun Kertasari Desa Sukarema Kecamatan Lenek Tahun 2020*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Gunung Rinjangi: Lombok Timur.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Masyarakat*.

Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. (2017, September 11), ksap.org. <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-desa/>

Sulaiman, M. Y. (2021). *Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Panrannuanku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

Susilawati, N. (2019, Januari). Retrieved from osf.io:
https://www.researchgate.net/publication/330399606_SOSIOLOGI_PEDESAAN